



RENCANA KERJA 2019



Pulau Tinabo Taman Nasional Takabonerate Foto : Asri (PEH Balai TN. Takabonerate)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Gedung Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Lantai 4
Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 Makassar (90243)– Sulawesi Selatan
Telepon : 0411-8954491 Fax : 0411-8954402 email : bphhksulawesi@yahoo.com



RENCANA KERJA 2019

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, yang memuat kinerja program dan anggaran untuk memenuhi sasaran di tahun 2019

Rencana kerja 2019 ini memuat hasil diskusi dalam berbagai forum yang secara resmi diselenggarakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





PRANALA

Rencana Kerja BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SULAWESI tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan Balai GAKKUM LHK Sulawesi dalam kurun waktu satu tahun.



Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK dan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan rencana kerja diharapkan adanya optimalisasi peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terkhusus Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran lingkungan Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi

Kepala Balai
GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi



M. Muhammad Nur, MSP



BAB I
PENDAHULUAN





LATAR BELAKANG



Presiden Joko Widodo

MISI

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

VISI

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

Agenda Nomor 4 : Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi system dan penegakan hukum yang berkeadilan;

- Sub Agenda : Peningkatan Penegakan Hukum yang berkeadilan

Sub Agenda : Pemberantasan Tindakan penambangan liar, perikanan liar dan Penambangan liar;

Agenda nomor 7 : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor strategis ekonomi domestic;

- sub Agenda : Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;



NAWACITA

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja

- Pembangunan bersifat **holistik komprehensif** memperhatikan seluruh dimensi terkait
- Pembangunan **untuk menusia dan masyarakat** harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (*entitled society*)
- Pembangunan **tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar**
- Pembangunan **tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem**
- Pembangunan harus mendorong **tumbuh berkembangnya swasta** dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan





KOMITMEN NEGARA

KOMITMEN NEGARA UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
- UUD 1945 Pasal 28 H”

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
- UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3

MANDAT PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- UU 5/1990 → Konservasi SDA Hayati & Ekosistem
- UU 41/1999 → Kehutanan
- UU 18/2018 → Pengelolaan Sampah
- UU 32/2009 → Perlindungan & Pengelolaan LH
- UU 18/2013 → P3H
- UU 37/2014 → Konservasi Tanah & Air
- UU 8/2010 → Pencegahan & Pemberantasan TPPU
- UU 4/2009 → Mineral & Batubara
- UU 39/2014 → Perkebunan
- UU 26/2007 → Penataan Ruang
- UU 27/2007 jo. UU 1/2014 → Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

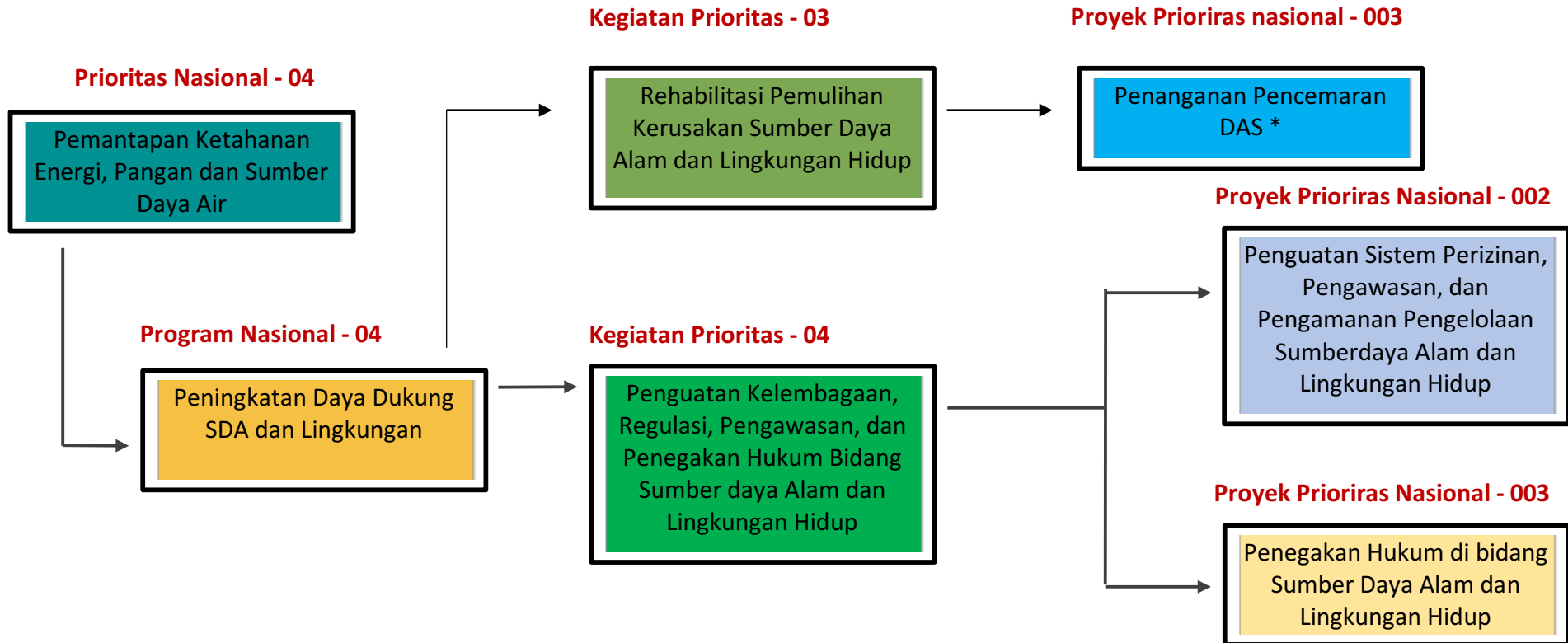


“Penegakan hukum harus betul-betul dilakukan, baik administrasi, perdata atau pidana... Ini harus dilakukan agar menciptakan sebuah kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat”

Ratas Karhutla (12 Agustus 2016)



PROYEK PRIORITAS NASIONAL



- Untuk Penanganan Pencemaran DAS tidak masuk dalam kegiatan Balai Gakkum LHK Sulawesi

TUJUAN dan SISTEMATIKA

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas yang pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang menggunakan prinsip money follows program. Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen Perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian / Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja K/L. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJM 2015-2019 telah diterjemahkan kedalam Renstra Kementerian LHK 2015-2019 dan Renstra Eselon I dan II dan Unit Pelaksana Teknis dan akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dengan memperhatikan prioritas nasional pada tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja- KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan Renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi e-planning KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Dokumen Renja- KLHK menjadi acuan bagi Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahunan yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.

PENJABARAN RUMUSAN RENCANA KINERJA KLHK 2015-2019

TUJUAN PEMBANGUNAN KLHK 2015-2019

“ Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN



- 2015** Reorganisasi selesai, internalisasi dan adaptasi system, persiapan peningkatan akses kelola hutan kepada masyarakat, persiapan dan pelaksanaan reformasi agrarian;
- 2016** Perbaikan 15 DAS dalam peningkatan IKLH dan ketahanan air, Intervensi 229 KPH, Sanctuary pada 20 taman nasional, penyiapan modal social;
- 2017** Peningkatan Kualitas 15 DAS, penurunan degradasi dan peningkatan produksi hutan pada 229 KPH, peningkatan produksi TSL, peningkatan IKLH, terjadinya perbaikan hutan yang dikelola masyarakat dan menurunnya konflik tenurial;
- 2018** ketahanan air oleh 15 DAS, sumbangan penyerapan tenaga kerja dan akselerasi pembangunan ekonomi nasional di 329 KPH dan 50 TN, hutan yang dikelola masyarakat mampu meyakinkan peningkatan kesejahteraan dan produksi hasil hutan
- 2019** 15 DAS, 429 KPH dan 50 TN serta peningkatan akses masyarakat telah dapat di artikulasikan sebagai dukungan Kementerian terhadap pembangunan nasional yang ditujukan dengan pencapaian 3 sasaran strategis di tingkat nasional.



INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TUJUAN

“ Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada rentang populasi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”

SASARAN STRATEGIS

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, Air dan kesehatan masyarakat
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Indeks kualitas hidup
2. Jumlah PNBPN dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup
3. Nilai Ekspor Hasil hutan
4. Jumlah Komulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70
5. Jumlah komulatif kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang memproduksi barang dan jasa secara lestari
6. Luas komulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dikembalikan sebagai sentra produksi hasil hutan



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SASARAN PROGRAM

1. Seluruh pemegang ijin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
2. Meningkatnya hak-hak Negara atas pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

TUJUAN

“ Mengamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Meningkatnya ketaatan pemegang ijin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
2. Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran Illegal Tumbuhan satwa liar
3. Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan



INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2015-2019

2015

- Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun;
- Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan

2016

- Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum meningkat setiap tahun;
- Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan

2017

- Meningkatnya ketaatan pemegang ijin lingkungan terhadap peraturan;
- Jumlah penyelesaian kasus P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan pembalakan;
- Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

2018

- Meningkatnya ketaatan pemegang ijin lingkungan terhadap peraturan;
- Jumlah penyelesaian kasus P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan pembalakan;
- Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan

2019

- Meningkatnya ketaatan pemegang ijin lingkungan terhadap peraturan;
- Jumlah penyelesaian kasus P-21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan pembalakan;
- Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan



BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

SASARAN KEGIATAN

1. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan terhadap gangguan dan ancaman keamanan kawasan hutan diwilayah kerja Sulawesi
2. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan ijin, ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap sanksi administrasi
3. Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara profesional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui sosialisasi, patrol dan operasi
2. Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan hokum memenuhi standar minimum
3. Pengaduan masuk yang tertangani
4. Usaha dana tau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan
5. Sarana Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam pelaksanaan pengawasan memenuhi standar minimum
6. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21
7. Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Prasarana PPNS

KONDISI UMUM

Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sector dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antar lembaga penegakan hukum.

Kolaborasi antar lembaga penegakan hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan SDA

KONDISI KHUSUS

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan GAKKUM LHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum tersebut. Pendekatan penegakan hukum dibuat untuk mendukung pendaya gunaan strategi yang akan di implementasikan dan diharapkan dapat memberi terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015-2019

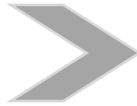
- Penanganan Perubahan Iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim kebencanaan
- Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati
- Perbaikan kualitas Lingkungan Hidup
- Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologis
- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- Pengelolaan Lingkungan Pesisir, Terumbu karang dan Pulau-pulau kecil
- Pengembangan Jasa Lingkungan

TIPOLOGI KEJAHATAN LHK

- Perambahan Kawasan hutan
- Pembakaran Hutan dan lahan
- Pembalakan liar
- Kejahatan Hidupan Liar
- Perusakan Lingkungan
- Limbah B3/ Sampah/ B3
- Pencemaran Industri



BALAI GAKKUM LHK
WIL SULAWESI



- PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG
- PLANOLOGI KEHUTANAN
- PERHUTANAN SOSIAL
- PENGHELOLAAN HUTAN LESTARI
- PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



- KEAMANAN DAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA PRODUKSI
- PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI
- PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- PENGENDALIAN DAN PERUBAHAN IKLIM
- KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
- PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3



TUJUAN STRATEGIS



PENGAWASAN

INPEKTORAT
JENDERAL

KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI



TUGAS

- Penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan

FUNGSI

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- e. penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

STRUKTUR ORGANISASI



KEPALA BALAI
Ir. Muhammad Nur, MSP



KA. SUB BAGIAN TATA USAHA
Achmad Yusuf, S.H., M.H.



KA. SEKSI WILAYAH I MAKASSAR
Muhammad Amin, SH



KA. SEKSI WILAYAH II PALU
Subagio, SH



KA. SEKSI WILAYAH III MANADO
William DT Tengker, S.H., M. Hum

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**



PENGARUSUTAMAAN GENDER

Di tahun 2019, Sub kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Balai GAKKUM LHK Sulawesi akan mengidentifikasi kegiatan yang Responsive gender, terutama kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana baik untuk PPLH, PPNS maupun Polhut (SPORC) di lingkup Balai GAKKUM LHK Sulawesi, sehingga pelaksanaan kegiatan ini tentu memperhatikan Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di dala, Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender sehingga Anggaran Gender terlaksana dengan efektif dan efesien.

SARANA PRASARANA PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

- Penyediaan sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan Hutan

2 Lokasi

Rp. 180.000.000,-

SARANA PRASARANA PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

- Penyediaan sarana Prasarana Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

3 Lokasi

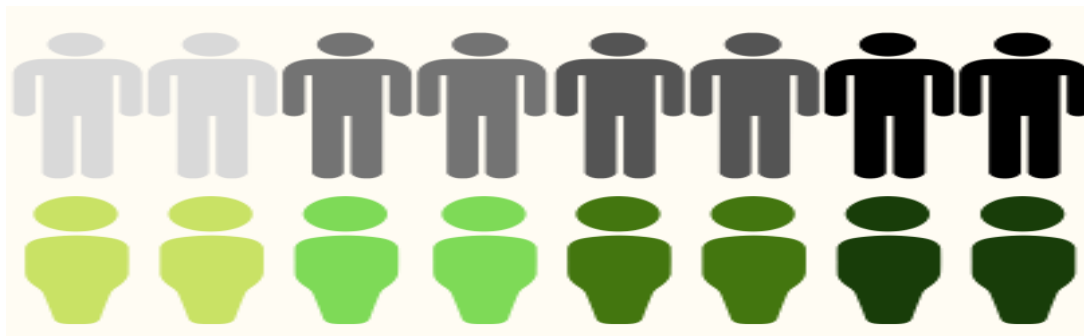
Rp. 90.000.000,-

SARANA PRASARANA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Penyediaan sarana Prasarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 Lokasi

Rp. 30.000.000,-



Anggaran Responsive Gender (ARG)

Balai GAKKUM LHK Wilayah Sulawesi

Rp. 300.000.000,-



PELUANG DAN TANTANGAN

Guna menjaga keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan hidup perlu dibangun sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan hukum, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Peluang

Upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara Republik Indonesia dan tujuh undang-undang tentang konservasi, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan pencucian uang. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ini juga terlaksana dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari pemimpin negara yang tercermin dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dukungan Masyarakat, kolaborasi dan kordinasi institusi penegakan hukum, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi semakin menunjang terciptanya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan mencapai Pembangunan yang berwawasan lingkungan.



KONSTITUSI HIJAU | Pasal 28 H Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 4



KOMITMEN POLITIK NASIONAL | "TINDAK TEGAS PARA PELAKU ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL MINNING DAN ILLEGAL FISHING!!!" (**Presiden Joko Widodo. Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2015**)



NAWACITA | Memperkuat Kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan Terpercaya.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL | Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum yang berkualitas



PERATURAN OPERASIONAL | **UU. No 5/1990** tentang KSDAE, **UU No. 41/1999** tentang Kehutanan, **UU. 32/2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **UU. No 18/2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, **UU. No. 37/2014** tentang Konservasi Tanah dan Air, **UU. No. 18/2008** tentang Pengelolaan Sampah, **UU. No. 8/2010** tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

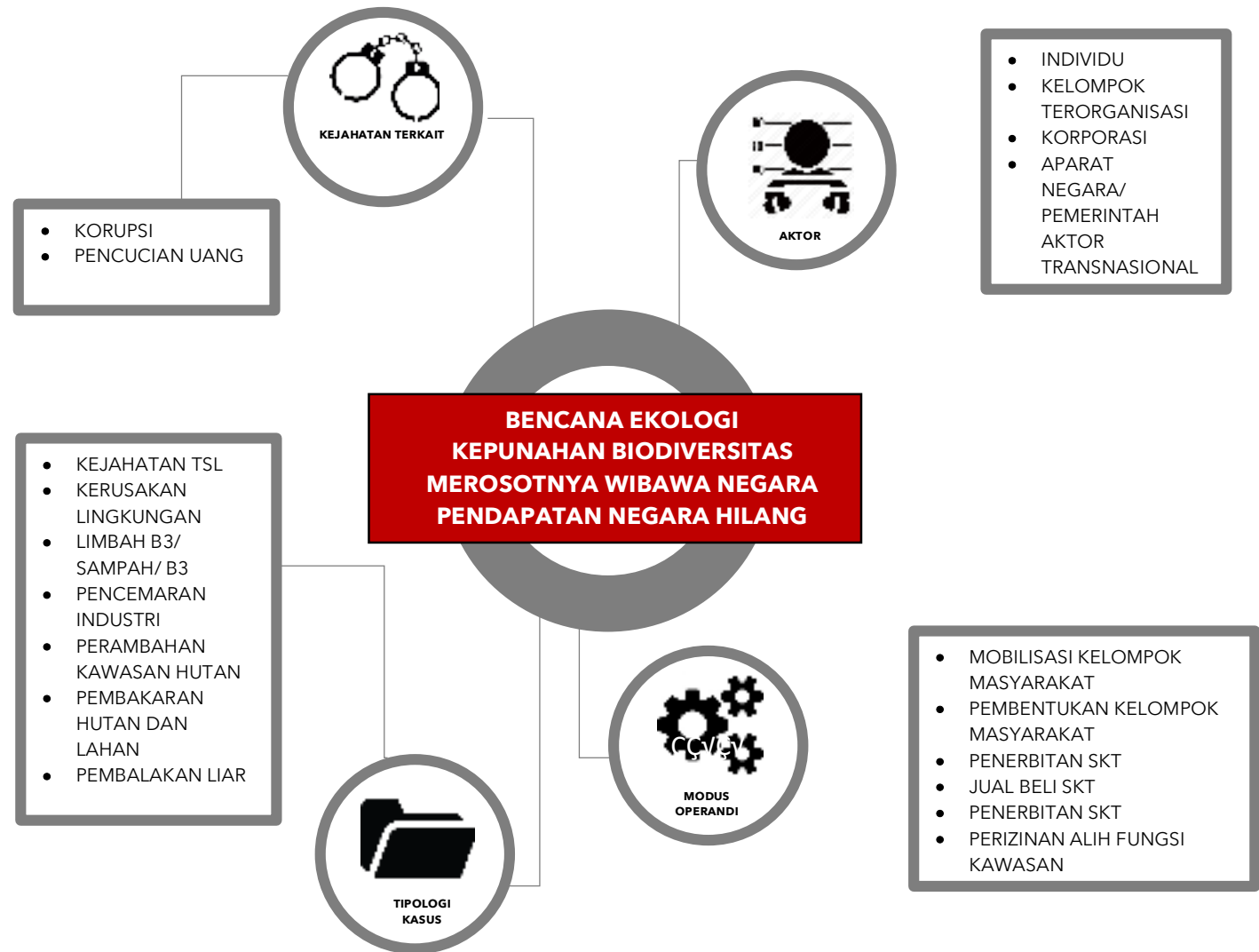


PELUANG DAN TANTANGAN

Tantangan

Ditjen Gakkum KLHK dan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi berurusan dengan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary Crime) karena tipologi kejahatan yang bervariasi, modus operandi yang kompleks serta dilakukan oleh multi aktor. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang besar yaitu menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir, kekeringan, kebakaran hutan), mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula.

“Fight Against Xtraordinary Crime”





BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS





CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2017 Per Kegiatan

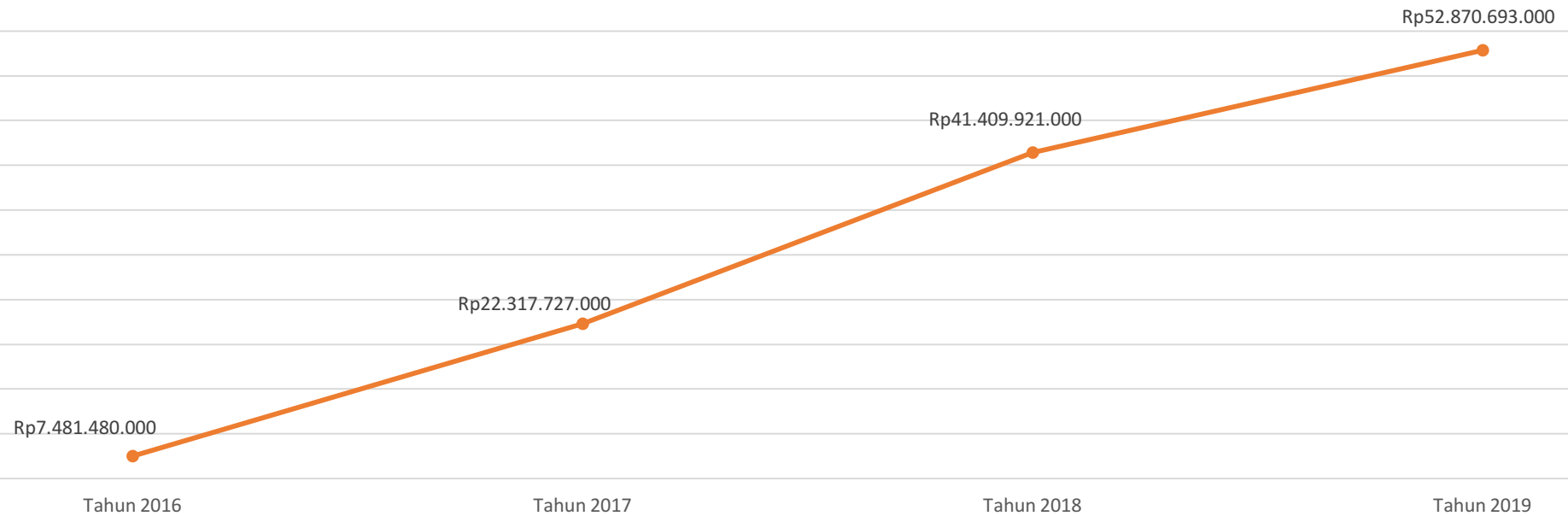
Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
5427 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.657.637.000	12.565.036.068	99.27
5428 Pencegahan dan Pengamanan Hutan	5.623.794.000	5.315.103.693	94.51
5430 Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1.239.326.000	1.142.636.401	92.20
5431 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.796.970.000	2.446.325.446	87.46
Total	22.317.727.000	21.469.101.608	96.20





PENDANAAN BALAI GAKKUM LHK WILAYAH SULAWESI

Kerangka Pendanaan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi

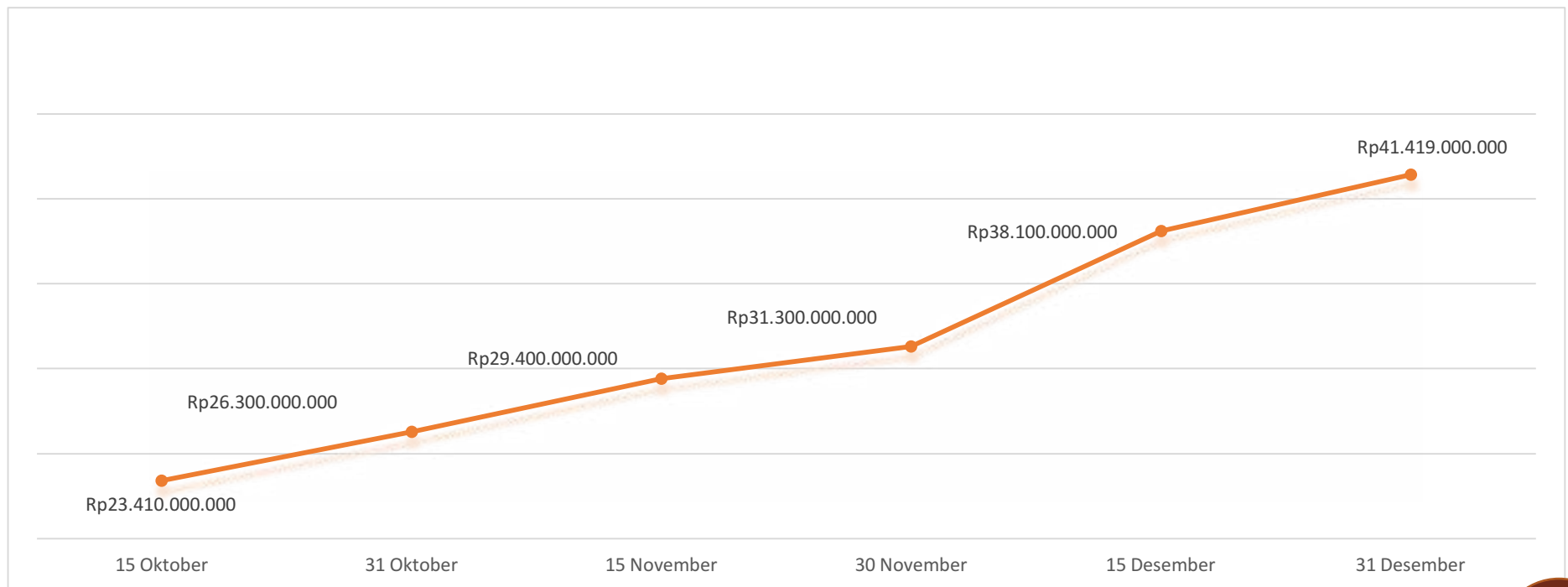




PROGNOSIS CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2018

Pagu 2018 = Rp. 41.409.921.000,-

% = 93.10





A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti

Penanganan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam yang disampaikan oleh masyarakat tertangani sehingga pencemaran dan/ atau kerusakan yang ditimbulkan oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diatasi. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi, dunia usaha, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK melalui Direktorat Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi Administrasi dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi



	2016	2017	2018	2019
Target	100% Pengaduan	55 Pengaduan	80 Pengaduan	110 Pengaduan
Capaian	24 Pengaduan	45 Pengaduan	41 Pengaduan	120 Pengaduan



A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Tujuan dilakukan pengawasan izin dibidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah :

- Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan dibidang pemanfaatan sumber daya alam.
- Pengawasan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang akurat dan menyeluruh untuk penegakan hukum dan dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Target

	2016	2017	2018	2019
	100%	30	40	60
	Izin	Izin	izin	izin
	25	97	137	70
	Izin	Izin	Izin	Izin

Capaian





A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kasus Pidana LHK yang diselesaikan (P-21)

Tujuan dari penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan adalah :

- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk para pelaku usaha;
- Menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat;
- Menjamin terjaganya sumber daya alam bagi keberlangsungan pembangunan dan,
- Memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

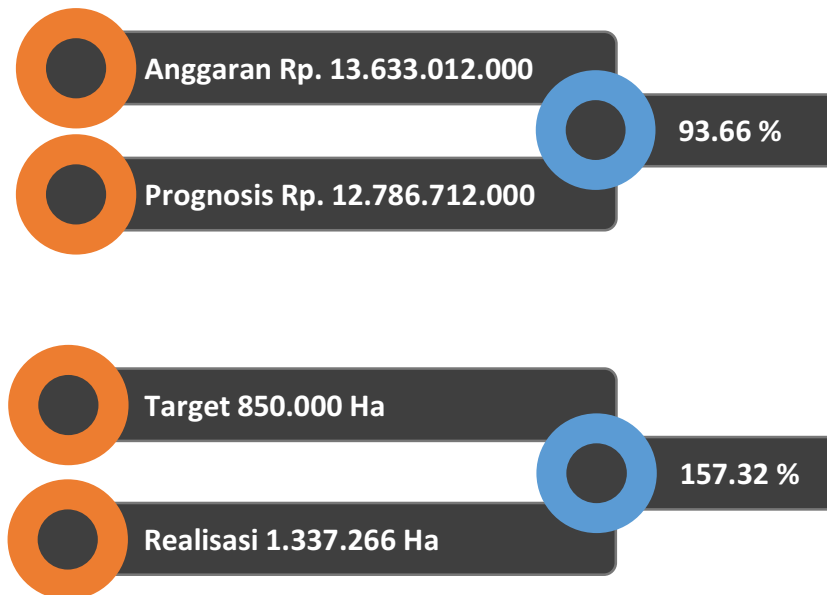
	2016	2017	2018	2019
Target	75%	9 P.21	15 P.21	22 P.21
Capaian	6 P.21	17 P.21	29 P.21	30 P.21

	2016	2017	2018	2019
Lokasi	1	5	850.000	375.000
		Provinsi	Ha	Ha
Lokasi	6	931.684	1.337.266	1.400.000
		Ha/ 6 Prov	Ha	Ha



B. PROGNOISIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

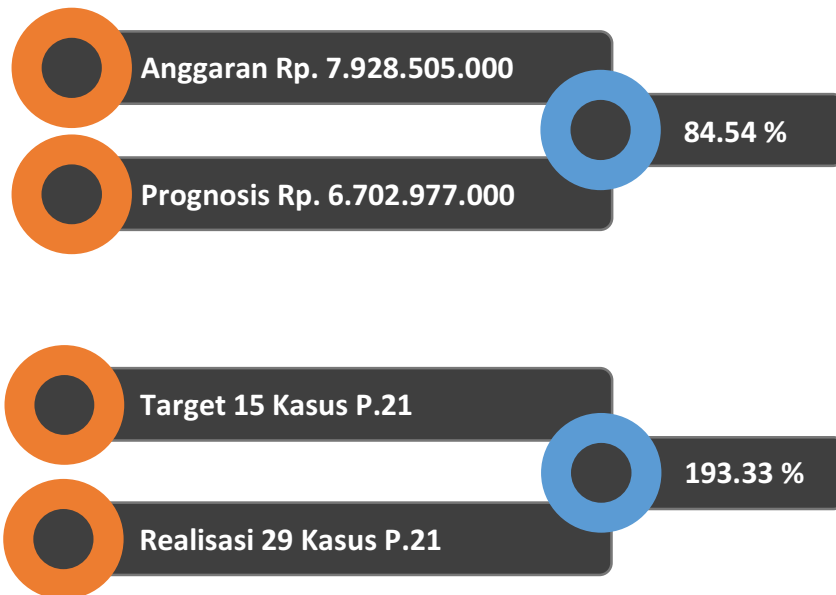
Prioritas Nasional 2018	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
Program Prioritas	Kepastian Hukum
Proyek Prioritas Nasional	Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
Proyek K/L	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
Output	Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan





B. PROGNOISIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

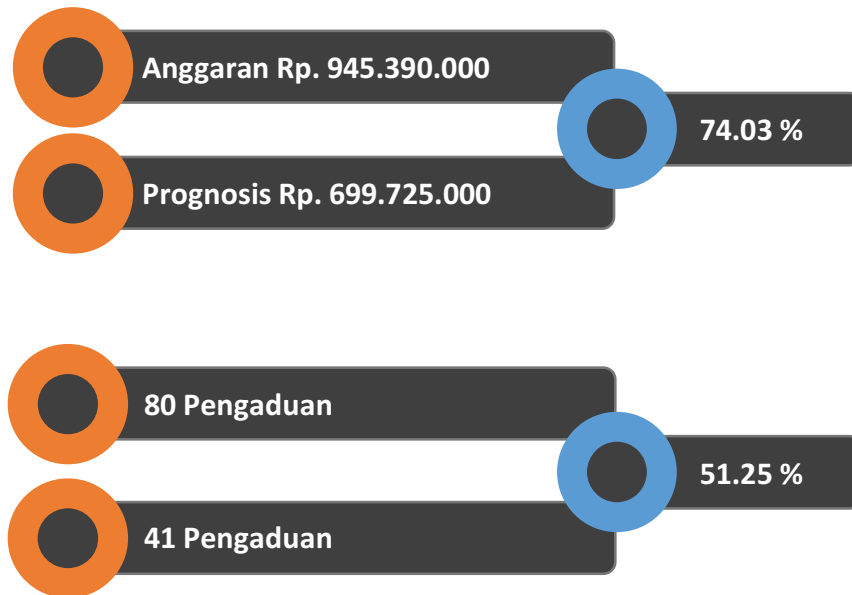
Prioritas Nasional 2018	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
Program Prioritas	Kepastian Hukum
Proyek Prioritas Nasional	Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
Proyek K/L	Pencegahan Tindak Pidana Pemanfaatan SDA dan Penegakan Hukum Pidana Pemanfaatan SDA
Output	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P-21)





B. PROGNOISIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

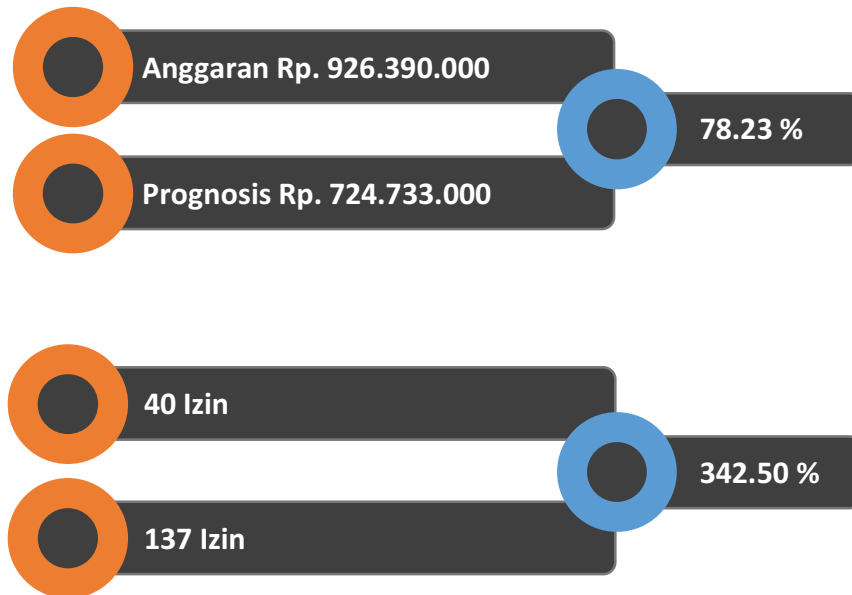
Prioritas Nasional 2018	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
Program Prioritas	Kepastian Hukum
Proyek Prioritas Nasional	Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
Proyek K/L	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Pemanfaatan SDA
Output	Penanganan Pengaduan yang ditindaklanjuti





B. PROGNOISIS KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

Prioritas Nasional 2018	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
Program Prioritas	Kepastian Hukum
Proyek Prioritas Nasional	Pengawasan Hukum Bidang Sumber Daya Alam
Proyek K/L	Pengawasan penanggungjawab usaha/ kegiatan dalam pemanfaatan SDA
Output	Penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH





BAB III
RENCANA KERJA





A. Prioritas Nasional - 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Program Prioritas - 4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung

Kegiatan Prioritas -4 :

Penguatan kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Proyek Prioritas Nasional - 002 :

Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- a. Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan Operasi **375.000** Hektar

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

- a. Pengaduan yang masuk tertangani **110** Pengaduan
b. Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan **60** Izin

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) **22** Kasus



B. Non Prioritas Nasional

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

- a. Layanan Dukungan Manajemen Satker **1** Layanan
- b. Layanan Perkantoran **1** Layanan

Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- a. Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengamanan hutan yang memenuhi standar minimum **1** Lokasi

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

- a. Sarana Prasarana, Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum **1** Lokasi

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Sarana Prasarana Penegakan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum **1** Lokasi



BAB IV

PENUTUP

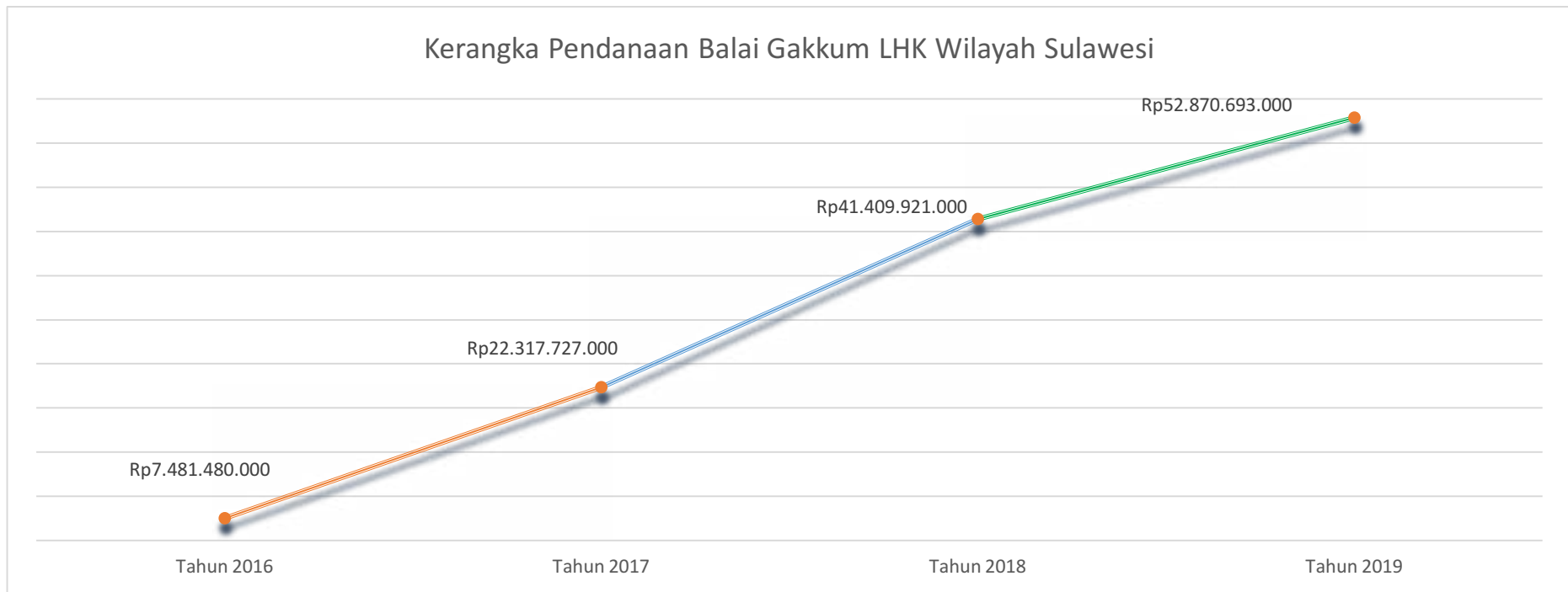
PENUTUP

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan tercapainya optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapainya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran dilingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi



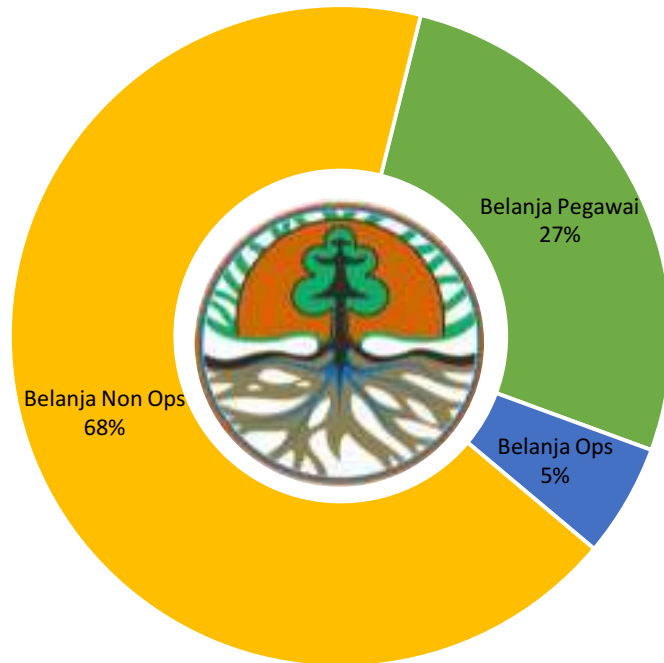
PROFESIONAL RESPONSIF PEDULI INTEGRITAS

Tabel 1 : Pendanaan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran 2016 - 2019



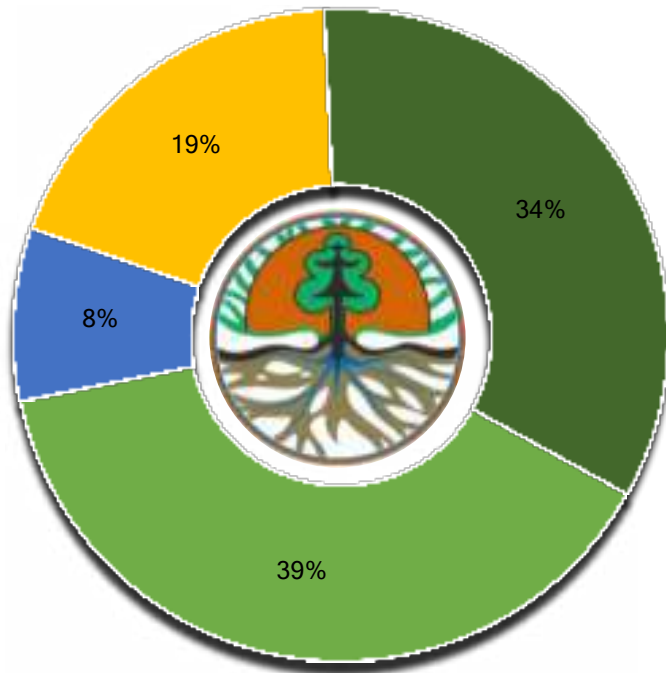
Tabel 2 : Kerangka Pendanaan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran 2019

PER JENIS BELANJA



Sumber Dana	Belanja Non Operasional	Belanja Operasional	Belanja Pegawai	Jumlah
RM	Rp. 26.459.222.000	Rp. 2.917.946.000	Rp. 14.120.500.000	Rp. 43.497.668.000
PNBP	Rp. 9.373.025.000	-	-	Rp. 9.373.025.000
Jumlah	Rp. 35.832.247.000	Rp. 2.917.946.000	Rp. 14.120.500.000	Rp. 52.870.693.000

Tabel 3 : Kerangka Pendanaan Per Kegiatan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran 2019



ANGGARAN PER KEGIATAN

1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Rp. 20.500.727.000,-

2. Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administratif

Rp. 4.506.520.000,-

3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rp. 10.000.000.000,-

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya

Rp. 17.863.446.000,-

Tabel 5 : Anggaran Prioritas Nasional Program Kegiatan pada Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Tahun

Prioritas Nasional -4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air

Program Prioritas -4 : Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Kegiatan Prioritas : Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROYEK PRIORITAS NASIONAL – 002

Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan
Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup

Rp. 19.957.247.000

Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan

- | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| a. Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan Operasi | 375.000 Hektar | Rp. 7.750.727.000,- |
|---|-----------------------|----------------------------|

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

- | | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| a. Pengaduan yang masuk tertangani | 110 Pengaduan | Rp. 1.756.520.000,- |
| b. Usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan | 60 Izin | Rp. 2.000.000.000,- |

Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| c. Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) | 22 Kasus | Rp. 8.450.000.000 |
|---|-----------------|--------------------------|



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Muhammad Nur, MSP

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kesehatan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Rido Sari, M.Com., MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kesehatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai terdapat perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebersihan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH/LHK Sulawesi

Dr. Rasio Rido Sari, M.Com., MPM
NIP. 19660711 196203 1 018

Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP. 19670727 196703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Pengawasan dan Pengamanan Hutan	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi Sarana Prasarana Pengawasan dan Pengamanan Hutan yang memenuhi standar minimum	325.000 Ha 1 Loka
2	Penyusunan Pengadaan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengadaan yang masuk tertangan Usaha dan atau kegiatan yang standar dan lengkap, pembayar perusahaan Sarana Prasarana Pengawasan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang memenuhi standar minimum	100% dan Pengadaan yang Masuk (100 Pengadaan) SD LP 1 Loka
3	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rakia pidana LHK yang diselesaikan sesuai dengan PDI dengan perkara dinyatakan lengkap Sarana Prasarana Pengawasan Hukum Pidana LHK yang memenuhi standar minimum	22 Perkara (P-2) 1 Loka
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan manajemen Saker Layanan Penerimaan	1 Laporan 12 Layanan

Kegiatan:

1. Pengawasan dan Pengamanan Hutan Rp. 20.500.727.000
2. Penanganan Pengadaan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Rp. 4.500.520.000
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp. 10.000.000.000
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp. 17.800.440.000

Total Anggaran Rp. 52.800.687.000

Jakarta, Desember 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK

Pihak Pertama,
Kepala Balai PPH/LHK Sulawesi

Dr. Rasio Rido Sari, M.Com., MPM
NIP. 19660711 196203 1 018

Ir. Muhammad Nur, MSP
NIP. 19670727 196703 1 001



BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI